



Dari Pelayanan Kesehatan Hingga Pelayanan Seksual: Sejarah Mobilisasi Perempuan Indonesia Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945

¹Lisa Aisyiah Rasyid, ²Olha S. Niode

¹Prodi Sejarah Peradaban Islam/Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Manado, Indonesia

²Prodi Filsafat Islam/Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

¹lisa.rasyid@iain-manado.ac.id, ²olhasniode@iain-manado.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 24-11-2025

Disetujui: 29-12-2025

Kata Kunci:

Mobilisasi Perempuan

Pendudukan Jepang

Fujinkai

Jugun Ianfu

Pelayanan Kesehatan

Keywords:

Women's Mobilization

Japanese Occupation

Fujinkai

Jugun Ianfu

Health Services

ABSTRAK

Abstrak: Masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) merupakan periode krusial yang memobilisasi perempuan secara masif dalam berbagai sektor untuk mendukung kepentingan perang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontradiksi peran perempuan, mulai dari keterlibatan dalam pelayanan kesehatan hingga eksploitasi dalam pelayanan seksual. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi pustaka, yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui organisasi Fujinkai, perempuan dimobilisasi sebagai tenaga bantuan medis, petugas palang merah, dan pengelola logistik untuk mendukung serdadu Jepang serta masyarakat. Namun, di sisi lain, pemerintah militer Jepang melembagakan sistem *Jugun Ianfu*, sebuah praktik perbudakan seksual yang memaksa perempuan Indonesia menjadi pemuas kebutuhan biologis tentara melalui cara-cara manipulatif dan kekerasan. Mobilisasi ini didorong oleh propaganda "Saudara Tua" dan ideologi gender Jepang yang memosisikan perempuan sebagai penjaga garis belakang. Dampak dari kebijakan ini menyisakan trauma psikologis mendalam dan stigma sosial bagi para korban, yang memicu munculnya berbagai bentuk resistensi dan tuntutan keadilan pasca-perang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mobilisasi perempuan pada masa Jepang merupakan bentuk eksploitasi total yang mendegradasi martabat kemanusiaan demi ambisi militerisme.

Abstract: The Japanese occupation period in Indonesia (1942-1945) was a crucial period that saw the massive mobilization of women across various sectors to support war interests. This study aims to uncover the contradictions in women's roles, ranging from involvement in health services to exploitation in sexual services. The method used is historical research with a literature study approach, encompassing the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The research results show that through the Fujinkai organization, women were mobilized as medical aid personnel, Red Cross officers, and logistics managers to support Japanese soldiers and the community. However, on the other hand, the Japanese military government institutionalized the *Jugun Ianfu* system, a practice of sexual slavery that forced Indonesian women to satisfy the biological needs of soldiers through manipulative means and violence. This mobilization was driven by "Greater Brother" propaganda and Japanese gender ideology that positioned women as "rear-line guards". The impact of this policy left deep psychological trauma and social stigma for the victims, which triggered various forms of resistance and demands for justice post-war. This study concludes that the mobilization of women during the Japanese period was a form of total exploitation that degraded human dignity for the sake of militaristic ambitions.



A. LATAR BELAKANG

Kekalahan Belanda oleh Jepang pada tahun 1942, ditandai dengan peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda ke Pemerintahan Jepang melalui perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Hal ini menjadi peristiwa bersejarah yang mengubah arah perjalanan sejarah Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 2019).

Pada awalnya, agar kedatangan bangsa Jepang dapat diterima oleh rakyat Indonesia, mereka mempropagandakan akan membebaskan bangsa Asia dari belenggu penjajahan bangsa Barat. Jepang juga mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda (Armelia F., 2019).

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945 yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan suatu periode paling menentukan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Armelia F., 2019).

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) di Indonesia, perempuan mengalami mobilisasi yang masif dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan hingga yang kontroversial, pelayanan seksual. Di bawah pemerintahan kolonial Jepang, perempuan Indonesia dipaksa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas untuk mendukung kegiatan perang (Nurliana, 1945). Melalui organisasi *Fujinkai*, perempuan diposisikan sebagai bala bantuan bagi tentara yang berperang digaris depan (Ningrum & Wasono, 2023), diantaranya melalui pelayanan kesehatan. Sedangkan melalui sistem *Jugun Ianfu*, perempuan diwajibkan menjadi budak seksual tentara Jepang (Yuliyanti, 2022).

Kebijakan di atas tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu studi ini bertujuan mengungkap kontradiksi mendasar dalam peran perempuan yang dimobilisasi pada periode tersebut. Di satu sisi, perempuan didorong untuk berperan aktif dalam mendukung upaya perang Jepang, termasuk dalam bidang kesehatan dan logistik. Di sisi lain, mereka juga dipaksa masuk ke dalam praktik-praktik yang merendahkan martabat dan melanggar

hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman perempuan Indonesia dalam konteks sejarah yang penuh gejolak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Tahapan penelitian dimulai dengan heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini meliputi dokumen arsip, majalah, buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan mobilisasi perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sumber-sumber tersebut dapat berupa sumber primer, yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan sejarah mobilisasi perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang khususnya terkait *Fujinkai* dan *Jugun Ianfu*, maupun sumber sekunder, yaitu sumber yang ditulis berdasarkan interpretasi terhadap sumber primer.

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber, yang terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal bertujuan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber, sementara kritik eksternal bertujuan untuk membandingkan sumber-sumber yang berbeda untuk memverifikasi informasi dan mengidentifikasi potensi bias. Setelah sumber-sumber terkumpul dan dievaluasi, dilakukan interpretasi, yaitu menganalisis sumber-sumber tersebut untuk memahami konteks sejarah dan makna mobilisasi perempuan Indonesia. Interpretasi ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang memenuhi standar akademik. Dalam tahap ini, peneliti menyajikan temuan-temuan secara jelas dan argumentatif, serta menawarkan perspektif baru tentang sejarah mobilisasi perempuan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Perempuan Dalam Sektor Kesehatan

a. Peran Perempuan Dalam Pelayanan Kesehatan

Sejak awal kedatangan, pemerintah militer Jepang sebenarnya telah mencari dukungan perempuan dalam menyelesaikan misi penjajahan. Untuk itu, perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) dilibatkan dalam berbagai aktivitas pelayanan kesehatan melalui organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang seperti **Fujinkai** dan badan-badan terkait (Darajati, 2023).

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943 (Aris Pratama, 2018), dipimpin oleh Nyonya Sunarjo Mangunpuspito (1943–1945). Fujinkai adalah organisasi perempuan bentukan Jepang yang merupakan peleburan seluruh organisasi perempuan Indonesia (Suratmin et al., 1991). Pembentukan Fujinkai oleh Jepang, pada dasarnya bertujuan untuk meringankan penderitaan orang banyak. Sebab Jepang memerlukan organisasi ini sebagai tenaga bantuan untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi yang buruk pada masa itu. Melalui Fujinkai, diadakan kegiatan sosial di kampung-kampung di dalam kota, antara lain penyuluhan tentang kesehatan (Aditia et al., 2022).

Perempuan yang bergabung dalam organisasi Fujinkai diberikan pelatihan untuk menjadi petugas palang merah (Darajati, 2023). Mereka dilatih dalam penanganan luka-luka perang, perawatan pasien di rumah sakit, dan penyediaan bantuan medis di garis belakang (Aditia et al., 2022). Beberapa perempuan juga diberi pelatihan medis dasar seperti P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) dan teknik kepalangmerahan, termasuk mengunjungi rumah sakit untuk melayani para pasien dan korban perang (Ningrum & Wasono, 2023).

Fujinkai memiliki sub-bagian yang bertugas dalam kegiatan kesehatan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi Romusha (pekerja paksa) yang mengalami penyakit akibat kerja paksa. Mereka juga bergerak dalam pengumpulan bahan pangan dan pakaian untuk mendukung tenaga kesehatan (Sondarika, 2017).

Perempuan di bawah organisasi Fujinkai menjalankan dapur-dapur umum untuk memasak dan menyediakan makanan bagi pekerja dan tentara di medan perang. Mereka juga membantu mendirikan dapur keliling untuk distribusi makanan

di lokasi yang lebih terpencil (Aditia et al., 2022). Fujinkai juga melibatkan perempuan dalam program sosialisasi gaya hidup sehat. Mereka mengunjungi desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sanitasi, kesehatan, dan pola hidup hemat selama masa perang (Sondarika, 2017).

Anggota Fujinkai juga berperan dalam pengumpulan bahan makanan dan pakaian untuk mendukung pasukan perang dan masyarakat di sekitar mereka yang membutuhkan. Dalam beberapa kasus, mereka merawat korban yang sakit dan kekurangan gizi (Sondarika, 2017).

Aktivitas ini menunjukkan bahwa perempuan berperan signifikan dalam mendukung pelayanan kesehatan, meskipun dalam konteks keterpaksaan kolonial. Keikutsertaan perempuan Indonesia dalam layanan kesehatan kala itu mencerminkan kemampuan mereka untuk beradaptasi di berbagai sektor. Dalam lingkup rumah tangga, pos kesehatan desa, dan peran lebih formal di rumah sakit atau dapur umum, perempuan memainkan peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, perempuan yang terlibat dalam sektor kesehatan ini, bekerja dalam kondisi yang sulit dan penuh tantangan. Kondisi ini ditandai dengan pelatihan yang minimal, beban kerja yang berat, dan diskriminasi dalam hal pengakuan serta fasilitas. Meskipun perempuan berkontribusi signifikan dalam mendukung upaya perang Jepang, kontribusi mereka sering kali direduksi menjadi pekerjaan domestik atau pendukung, dengan kompensasi yang tidak setara dan fasilitas yang tidak memadai. Hal ini mencerminkan bagaimana peran perempuan dimobilisasi secara masif tetapi tetap didasarkan pada hierarki gender yang meminggirkan mereka.

b. Motivasi Mobilisasi

Mobilisasi perempuan Indonesia dalam sektor kesehatan pada masa pendudukan Jepang, didorong oleh berbagai alasan strategis, politik, dan ekonomi yang terkait dengan upaya Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Terdapat beberapa motivasi utama yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam sektor ini:

- a) Kebutuhan Mendesak Akibat Krisis Perang. Kekalahan Jepang di berbagai medan perang pada tahun 1943 memaksa pemerintah kolonial

- b) Jepang untuk mengerahkan semua sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga perempuan, guna mendukung perang. Kekurangan tenaga laki-laki yang direkrut sebagai tentara dan pekerja paksa (Romusha) menciptakan kebutuhan tenaga kerja tambahan di sektor kesehatan dan pelayanan publik lainnya (Sondarika, 2017). Perempuan juga dianggap sebagai tenaga kerja potensial untuk mengisi posisi di garis belakang, termasuk sebagai tenaga medis, petugas palang merah, dan pengelola dapur umum yang mendukung kebutuhan tentara dan masyarakat (Rahmanita, 2022).
- c) Propaganda dan Ideologi Gender Jepang. Jepang menggunakan propaganda yang kuat untuk mendorong perempuan agar terlibat dalam perang dengan peran yang sesuai dengan ideologi gender yang mereka anut. Perempuan diposisikan sebagai "penjaga garis belakang" yang bertugas mendukung laki-laki di medan perang melalui kegiatan domestik, kesehatan, dan sosial (Ningrum & Wasono, 2023). Propaganda Jepang menonjolkan citra "perempuan ideal" sebagai sosok yang berbakti kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Mereka diarahkan untuk menjalankan tugas seperti merawat orang sakit, menyiapkan makanan, dan memastikan kebersihan serta kesehatan keluarga (Ningrum & Wasono, 2023).
- d) Upaya Menanamkan Loyalitas dan Kontrol. Melibatkan perempuan dalam organisasi seperti Fujinkai juga menjadi bagian dari strategi Jepang untuk menanamkan loyalitas terhadap pemerintahan kolonial mereka. Pelatihan medis dan sosial tidak hanya bertujuan mendukung perang, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial terhadap perempuan dan masyarakat secara keseluruhan (Rahmanita, 2022).

Mobilisasi perempuan dalam sektor kesehatan pada masa pendudukan Jepang merupakan bagian integral dari kebijakan mobilisasi total Jepang untuk mendukung perang Asia Timur Raya. Propaganda dan kebijakan yang diterapkan mencerminkan upaya Jepang untuk memanfaatkan perempuan sebagai tenaga kerja strategis sekaligus alat propaganda. Meskipun memberikan kesempatan bagi perempuan

untuk memperoleh keterampilan baru, mobilisasi ini dilakukan dalam kerangka kontrol yang ketat dan tujuan utama mendukung ambisi militer Jepang.

2. Mobilisasi Perempuan Dalam Sektor Seksual

a. Sistem *Jugun Ianfu*

Jugun Ianfu berarti "wanita penghibur yang mengikuti tentara". Nama resminya adalah *teishintai*, atau barisan sukarela penyumbang tubuh (Oktorino, 2013). Sistem *Jugun Ianfu* merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual yang dilembagakan oleh militer Jepang selama Perang Dunia II, termasuk di Indonesia (Sari, 2023).

Sistem *Jugun Ianfu* pertama kali muncul di Cina pada tahun 1932, setelah Jepang melakukan invasi ke Shanghai (Suliyati, 2018). Di sana, terjadi banyak kasus pemerkosaan massal oleh tentara Jepang, yang menyebabkan penyebaran penyakit kelamin di antara mereka (Yuliyanti, 2022). Untuk "mengatasi" masalah ini, Kaisar Hirohito memerintahkan Jendral Okabe dan Okamui Yauji untuk membangun rumah pelacuran, yaitu *Comfort Station (Ianjo)* yang diatur secara resmi (Sari, 2023). Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sistem ini diterapkan sebagai bagian dari strategi mereka dalam Perang Asia Timur Raya (Sari, 2023). Jepang memanfaatkan sumber daya manusia di wilayah jajahan, termasuk perempuan Indonesia, untuk mendukung kebutuhan biologis dan psikologis tentara (Wargiati et al., 2021).

Sistem *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) merupakan salah satu bentuk eksploitasi perempuan yang paling kelam dalam sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan para perempuan Indonesia yang kemudian menjadi *Jugun Ianfu* direkrut dengan cara yang manipulatif, seperti menawarkan pekerjaan di kota besar atau beasiswa pendidikan (Sari, 2023). Banyak perempuan muda yang tergiur dengan tawaran ini, tanpa menyadari bahwa mereka akan dijadikan budak seks (Suliyati, 2018). Perekrutan juga melibatkan intimidasi dan kekerasan fisik, termasuk penculikan oleh militer Jepang, dengan bantuan pejabat lokal seperti lurah dan camat melalui sistem *Tonarigumi* (struktur pengawasan tingkat desa) (Yuliyanti, 2022).

Seperti kisah seorang wanita yang diarsipkan dalam Data Tempo (disusun oleh Ismail dkk.), wanita tersebut bernama Siti (72 Tahun) asal Ujung Pandang. Siti disekap di sebuah rumah dan ditawarkan pekerjaan

sebagai operator di sebuah kantor, namun tak lama kemudian Siti di pindahkan ke hotel Beangkorop sebagai pelayan sekaligus melayani para tentara Jepang di tempat tidur. Setelah itu Siti dipindahkan ke sebuah rumah di Kampung Pisang, dan dijadikan *Jugun Ianfu* yang harus melayani tiga sampai empat tentara yang datang bergantian (Ismail et al., 2023).

Cerita lain yang juga diarsipkan oleh tim Data Tempo datang dari seorang wanita asal Manado yang ditemukan oleh wartawan TEMPO Phill M, Sulu. Wanita tersebut merupakan salah seorang bekas penghuni Mahakeret (bekas *Ianjo* yang dikelola oleh opsir Jepang). Wanita itu dulu dibujuk Jepang akan dipekerjakan di sebuah Rumah Sakit. Tapi kenyataannya dia justru dibawa ke *Ianjo* dan dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* oleh Jepang (Ismail et al., 2023).

Perempuan yang direkrut sering kali berasal dari golongan miskin, tidak berpendidikan, atau buta huruf (Wargiati et al., 2021). Mereka yang masih sangat muda (13–18 tahun) juga menjadi target utama, bahkan anak-anak yang belum menstruasi dipaksa untuk melayani tentara Jepang (Yuliyanti, 2022).

Setelah direkrut, perempuan-perempuan ini ditempatkan di *Ianjo*, yang dibangun di berbagai lokasi, termasuk bekas asrama peninggalan Belanda atau rumah penduduk yang dikosongkan (Wargiati et al., 2021). Setiap perempuan diberikan kamar bernomor, dan nama mereka diganti dengan nama Jepang. Pengamanan ketat diberlakukan untuk mencegah pelarian, dengan adanya kawat berduri dan penjagaan militer (Suliyati, 2018).

Dua penduduk Tomohon (kota 15 km dari Manado), menjadi saksi mata penderitaan sekitar 100 perempuan minahasa dibawah usia 20 tahun yang dibawa tentara Jepang dengan iming-iming akan disekolahkan menjahit. Dua saksi manata tersebut adalah Urbanus Taulus (72 tahun) seorang petani, dan Alex Lelengboto seorang mantan Bupati Minahasa. Keduanya dulu pernah bekerja sebagai pelayan di salah satu *Ianjo*. Menurut kesaksia mereka, Para perempuan tersebut dibawa ke *Ianjo* yang dipagari rapat dan tinggi. Para perempuan itu kemudian dijadikan *Jugun Ianfu* yang melayani tidak hanya tentara Jepang tetapi juga eks tentara Korea, Taiwan, bahkan Heiho (Ismail et al., 2023).

Sistem *Jugun Ianfu* dibungkus oleh propaganda Jepang sebagai bentuk kontribusi "mulia" perempuan

dalam perang. Doktrin *Hakko Ichiu* digunakan untuk meyakinkan perempuan bahwa mereka berperan dalam membangun Asia Timur Raya, meskipun kenyataannya mereka adalah korban eksploitasi. Sistem *Jugun Ianfu* mencerminkan kebrutalan dan dehumanisasi yang terjadi selama pendudukan Jepang. Dari perekrutan hingga penempatan dan eksploitasi, sistem ini tidak hanya menghancurkan kehidupan para korban, tetapi juga meninggalkan luka sejarah yang mendalam. Hingga saat ini, upaya mencari keadilan dan pengakuan bagi para korban masih berlanjut sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran sejarah.

b. Dampak Psikologis dan Sosial

Pengalaman menjadi *Jugun Ianfu* meninggalkan dampak yang mendalam dan kompleks bagi para korban, tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga pada kesehatan psikologis dan kehidupan sosial mereka. Peristiwa ini mencerminkan bagaimana eksploitasi perang dapat menghancurkan martabat individu dan komunitas secara keseluruhan.

Perempuan di *Ianjo* mengalami eksploitasi seksual brutal, sebab setiap hari mereka dipaksa melayani beberapa orang tentara dalam sehari (Sari, 2023). Kekerasan fisik dan emosional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Pemerkosaan, penyiksaan, dan ancaman pembunuhan terjadi jika mereka mencoba melarikan diri. Beberapa bahkan memilih bunuh diri karena tidak tahan dengan penderitaan (Suliyati, 2018).

Para perempuan sering mengalami pemeriksaan kesehatan paksa untuk memastikan mereka bebas dari penyakit menular seksual (Wargiati et al., 2021). Meski ada klaim bahwa *Ianjo* dirancang untuk menjaga moral tentara dan mencegah penyebaran penyakit, kenyataannya para perempuan tetap menderita penyakit kelamin dan trauma (Yuliyanti, 2022). Kehidupan di *Ianjo* menciptakan trauma psikologis mendalam, dan beberapa perempuan menjadi gila akibat tekanan mental dan fisik (Sari, 2023). Setelah perang, para korban sering kali mengalami stigma sosial dan pengucilan dari masyarakat karena dianggap sebagai "bekas pelacur" meskipun mereka adalah korban sistem (Yuliyanti, 2022).

Dampak psikologis dan sosial saling memperkuat satu sama lain. Trauma psikologis sering membuat korban sulit bersosialisasi, sementara stigma sosial yang mereka terima

memperburuk kondisi psikologis mereka (Suliyati, 2018). Sebagai contoh, korban yang dicemooh sebagai "bekas pelacur" merasa semakin tidak berharga, yang akhirnya memicu depresi lebih parah dan mendorong mereka untuk terus menyendiri (Wargiati et al., 2021).

c. Resistensi dan Perlawanan

Terdapat bentuk-bentuk resistensi dan perlawanan yang dilakukan oleh para korban *Jugun Ianfu* dan kelompok pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui upaya pasca-perang. Perlawanan ini terjadi dalam berbagai bentuk dengan tujuan utama untuk mendapatkan keadilan, pengakuan, dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami.

Beberapa korban mencoba melarikan diri dari kamp-kamp *Ianjo* (rumah pelacuran militer Jepang), meskipun risiko tertangkap sangat besar (Sari, 2023). Korban yang mencoba kabur sering kali dihukum dengan kejam, termasuk penyiksaan fisik hingga pembunuhan. Karenanya, dalam beberapa kasus, korban memilih bunuh diri sebagai bentuk penolakan terhadap kekejaman yang mereka alami (Wargiati et al., 2021). Bunuh diri dianggap sebagai upaya terakhir untuk menghindari penghinaan lebih lanjut (Yuliyanti, 2022).

Setelah perang berakhir, banyak korban tetap diam karena trauma atau stigma sosial. Namun, beberapa korban menunjukkan keberanian luar biasa untuk memperjuangkan hak mereka. Berikut adalah bentuk perlawanan yang mereka lakukan:

- a) Kesaksian Publik. Pada tahun 1991, seorang korban asal Korea Selatan, Kim Hak-soon, secara terbuka menyampaikan kesaksiannya sebagai mantan *Jugun Ianfu*. Ini memicu korban-korban lain dari berbagai negara untuk bersuara (Wargiati et al., 2021). Di Indonesia, tokoh seperti **Mardiyem** dari Yogyakarta menjadi salah satu suara paling vokal dalam menuntut keadilan. Ia mengungkap pengalamannya dan memperjuangkan hak-hak mantan *Jugun Ianfu* melalui pengadilan dan media (Wargiati et al., 2021).
- b) Tuntutan Hukum. Pada tahun 1900-an, berbagai organisasi advokasi di Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Indonesia mulai menuntut pemerintah Jepang untuk meminta

maaf dan memberikan kompensasi kepada para korban. Salah satu langkah penting dalam perjuangan ini adalah pembentukan Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan di Tokyo pada tahun 2000, di mana eks *Jugun Ianfu* dari berbagai negara memberikan kesaksian (Komnas HAM, 2013).

- c) Kampanye dan Advokasi. Para korban bekerja sama dengan organisasi internasional seperti **Amnesty International** dan kelompok advokasi perempuan untuk membawa perhatian dunia terhadap isu ini (Suliyati, 2018). Di Indonesia, advokasi juga dilakukan melalui media dan dokumentasi akademik, yang berfungsi untuk mencatat sejarah kelam ini agar tidak dilupakan (Wargiati et al., 2021).
- d) Monumen dan Pengakuan Sejarah. Perjuangan korban juga menghasilkan berbagai monumen dan museum yang didedikasikan untuk mengenang penderitaan mereka, seperti **Statue of Peace** di Korea Selatan dan proyek serupa di beberapa negara lain (Yuliyanti, 2022).

Beberapa bentuk resistensi dan perlawanan yang dilakukan oleh para korban *Jugun Ianfu* dan kelompok pendukungnya, bertujuan agar pemerintah Jepang dan dunia mengakui bahwa sistem *Jugun Ianfu* adalah bentuk perbudakan seksual yang disponsori negara. Sehingga pemerintahan Jepang perlu meminta maaf secara resmi dan harus mengakui bahwa mereka adalah korban perang, bukan pelacur sukarela seperti yang sering diklaim oleh beberapa pihak di Jepang. Korban ingin masyarakat memahami bahwa mereka adalah korban, bukan pelaku, sehingga stigma sosial terhadap mereka dapat dihapuskan. Selain itu, Korban dan pendukungnya juga ingin memastikan bahwa peristiwa ini tidak dilupakan dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang tentang bahaya perang dan kekerasan berbasis gender.

Meskipun banyak korban menghadapi tantangan besar, perlawanan mereka menunjukkan keberanian luar biasa. Dari upaya melarikan diri di masa perang hingga memperjuangkan keadilan di era modern, perjuangan ini mencerminkan semangat untuk mendapatkan kembali martabat yang telah dirampas. Perjuangan mereka juga menjadi pengingat bahwa

keadilan sejarah membutuhkan upaya kolektif dari masyarakat global.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Mobilisasi perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) menunjukkan adanya dualisme peran yang dipaksakan oleh pemerintah militer Jepang demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Di satu sisi, melalui organisasi Fujinkai, perempuan dilibatkan secara masif dalam sektor pelayanan kesehatan, mulai dari pelatihan pertolongan pertama (P3K), pengelolaan dapur umum, hingga penyuluhan sanitasi di tingkat desa. Meskipun aktivitas ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan baru dan berkontribusi strategis bagi masyarakat, seluruh kegiatan tersebut tetap berada di bawah kontrol ketat hierarki gender Jepang yang menempatkan perempuan hanya sebagai pendukung atau "penjaga garis belakang" bagi kepentingan serdadu di medan perang.

Di sisi lain, sejarah mencatat sisi kelam melalui sistem *Jugun Ianfu*, di mana ribuan perempuan Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual yang dilembagakan oleh militer Jepang. Rekrutmen yang dilakukan dengan cara manipulatif, intimidasi, hingga penculikan paksa menunjukkan bentuk dehumanisasi yang mengabaikan hak asasi manusia. Para korban ditempatkan dalam kamp-kamp (*Ianjo*) dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yang tidak hanya menghancurkan martabat mereka secara fisik tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam serta stigma sosial berkepanjangan yang mereka tanggung bahkan setelah perang berakhir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian artikel ini. Secara khusus, apresiasi diberikan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang telah memberikan dukungan akademik dan lingkungan penelitian yang kondusif. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sejarawan dan peneliti terdahulu yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam mengungkap sejarah mobilisasi perempuan masa pendudukan Jepang, khususnya terkait peran *Fujinkai* dan penyelesaian isu *Jugun Ianfu*. Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat

memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu sejarah di Indonesia serta menjadi bentuk penghormatan atas perjuangan para perempuan di masa lampau.

REFERENSI

- Aditia, D., Lestari, E. S., Adelia, D. N., Arif, S., & Perdana, Y. (2022). Gerakan Feminisme Fujinkai dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(1), 87–97.
<https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.5145>
- Aris Pratama. (2018). Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945). In A. Pratama (Ed.), *Derwati Press*. Maraga Borneo Tarigasa.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/98e09879-5412-4ff3-a86c-3d64e16269b6/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>
- Armelia, F. (2019). *Pendudukan Jepang di Indonesia - Google Play Buku* (A. F. (ed.); Digital). ALPRIN.
https://play.google.com/books/reader?id=jxwAEAAQBAJ&pg=GBS.PR1&source=gb_s_atb
- Darajati, K. (2023). Bersiasat Melawan Saudara Tua. *Lembaran Sejarah*, 19(1), 50.
<https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/view/79889/38266>
- Ismail, Widiarti, A., Muhadiansyah, D., & Koesumah, E. (2023). *Data Tempo: Kisah Perempuan Indonesia Menjadi Jugun Ianfu Penajajah Jepang*. TEMPO Publishing.
- Komnas HAM. (2013). Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Terhadap Perempuan :Keputusan 4 Desember 2001. In *Komnas HAM* (Pertama).
http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Kejahatan_perang
- Ningrum, H. W. S., & Wasono, S. (2023). Citra Perempuan Indonesia Masa Jepang Pada Dua Cerpen Dalam Majalah Pandji Poestaka (*The Image of Indonesian Women on Japanese Period in Two Short Stories in Pandji Poestaka Magazine*). *Sawerigading*, 29(1), 111–123.
<https://doi.org/10.26499/sawer.v29i1.1147>
- Nurliana, N. (1995). *Wanita Indonesia di Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) : Suatu Kajian Awal* (p. 77260). Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=77260&lokasi=lokal>
- Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah: Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia* (p. 65). PT Elex Media Komputindo.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 Zaman Jepang & Zaman Republik* (pp. xiv–808). Balai Pustaka.
http://perpustakaanbpnbjbar.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=3883&keywords=
- Rahmanita, A. S. 2022. *Gerakan Perempuan pada Abad 19-20 The Women 's Movement in the 19-20 Century*. 4(1), 43–51.
- Sari, E. (2023). Jugun Ianfu : Wanita Penghibur Dan Tentara Jepang 1942-1945. *Krinok*, 3(1), 51–63.
<https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.28238>

- Sondarika, W. (2017). Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 5(2), 207. <https://doi.org/10.24127/hj.v5i2.958>
- Suliyati, T. (2018). Jugun Ianfu : Derita Perempuan Dalam Pusaran Perang. *Kiryoku*, 2(3), 41. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v2i3.41-49>
- Suratmin, Sutjiatiningsih, S., Ohorella, G. A., Ernayanti, & Suhatno. (1991). *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional. [https://repository.kemdikbud.go.id/13009/1/BIOGRAFI TOKOH KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA.pdf](https://repository.kemdikbud.go.id/13009/1/BIOGRAFI%20TOKOH%20KONGRES%20PEREMPUAN%20INDONESIA%20PERTAMA.pdf)
- Wargiati, L., Fadilah, I. N., Setyawati, B. V. P. D., Shiyam, T. J., & Khodafi, M. (2021). Jugun Ianfu dan Hegemoni Jepang di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(2), 150-160. <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.2.150-160>
- Yuliyanti, S. (2022). Perbudakan Seksual Perempuan Indonesia: Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *FACTUM; Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 11(2), 229-238. <https://doi.org/10.17509/factum.v11i2.41974>.